



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.501, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Tambahan
Penghasilan. Guru PNS. Daerah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.07/2009

TENTANG

**ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNS Daerah.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
- (3) Guru PNS Daerah penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNS Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009.

- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok/pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pasal 3

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009 dilakukan secara sekaligus.

Pasal 5

- (1) Daftar perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.
- (2) Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru dilaksanakan sejak Guru bersangkutan diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak termasuk untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bulan ke-13.

- (4) Pemerintah Daerah penerima dana wajib membayarkan rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah diterima di Kas Umum Daerah.
- (5) Pembayaran rapel Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada masing-masing guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Daerah wajib menyampaikan Laporan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas waktu pembayaran kepada masing-masing guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas penyetoran kembali dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dilampirkan bersama-sama dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

- (3) Copy SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilegalisir oleh Bank Persepsi/Giro Pos penerima setoran.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah penerima dana tidak melakukan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil *non earmark* (Tambahan Dana Bagi Hasil Migas untuk Anggaran Pendidikan Dasar) terhitung mulai bulan April tahun 2010.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 223 /PMK.07/2009 tentang Penetapan
Rincian Alokasi dan Pedoman Umum Dana
Tambahkan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009

**ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI GURU PNSD PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	356,700,000
2	Kab. Aceh Barat	8,028,825,000
3	Kab. Aceh Besar	10,584,150,000
4	Kab. Aceh Selatan	8,118,000,000
5	Kab. Aceh Singkil	3,917,550,000
6	Kab. Aceh Tengah	7,275,450,000
7	Kab. Aceh Tenggara	6,740,400,000
8	Kab. Aceh Timur	8,084,175,000
9	Kab. Aceh Utara	12,533,700,000
10	Kab. Bireun	12,564,450,000
11	Kab. Pidie	12,893,475,000
12	Kab. Simeulue	3,819,150,000
13	Kota Banda Aceh	9,095,850,000
14	Kota Sabang	2,558,400,000
15	Kota Langsa	4,947,675,000
16	Kota Lhokseumawe	5,482,725,000
17	Kab. Nagan Raya	6,463,650,000
18	Kab. Aceh Jaya	4,009,800,000
19	Kab. Aceh Barat Daya	4,778,550,000
20	Kab. Gayo Lues	3,628,500,000

NO	DAERAH	JUMLAH
21	Kab. Aceh Tamiang	6,189,975,000
22	Kab. Bener Meriah	4,621,725,000
23	Kota Subulussalam	1,777,350,000
24	Kab. Pidie Jaya	5,421,225,000
	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Total	153,891,450,000
25	Provinsi Sumatera Utara	485,850,000
26	Kab. Asahan	12,546,000,000
27	Kab. Dairi	10,233,600,000
28	Kab. Deli Serdang	30,540,900,000
29	Kab. Tanah Karo	11,196,075,000
30	Kab. Labuhan Batu	6,562,050,000
31	Kab. Langkat	22,256,850,000
32	Kab. Mandailing Natal	11,266,800,000
33	Kab. Nias	11,764,950,000
34	Kab. Simalungun	24,815,250,000
35	Kab. Tapanuli Selatan	10,538,025,000
36	Kab. Tapanuli Tengah	8,148,750,000
37	Kab. Tapanuli Utara	10,627,200,000
38	Kab. Toba Samosir	10,049,100,000
39	Kota Binjai	6,122,325,000
40	Kota Medan	26,586,450,000
41	Kota Pematang Siantar	7,287,750,000
42	Kota Sibolga	3,244,125,000
43	Kota Tanjung Balai	4,142,025,000
44	Kota Tebing Tinggi	3,680,775,000
45	Kota Padang Sidempuan	6,977,175,000
46	Kab. Pakpak Bharat	2,051,025,000
47	Kab. Nias Selatan	4,916,925,000

NO	DAERAH	JUMLAH
48	Kab. Humbang Hasundutan	5,870,175,000
49	Kab. Serdang Bedagai	11,279,100,000
50	Kab. Samosir	5,036,850,000
51	Kab. Batu Bara	9,323,400,000
52	Kab. Labuhan Batu Utara	6,848,025,000
53	Kab. Labuhan Batu Selatan	4,191,225,000
54	Kab. Padang Lawas Utara	4,969,200,000
55	Kab. Padang Lawas	3,865,275,000
56	Provinsi Sumatera Barat	879,450,000
57	Kab. Limapuluh Kota	11,940,225,000
58	Kab. Agam	14,427,900,000
59	Kab. Kepulauan Mentawai	2,573,775,000
60	Kab. Padang Pariaman	12,487,575,000
61	Kab. Pasaman	11,789,550,000
62	Kab. Pesisir Selatan	13,056,450,000
63	Kab. Sijunjung	8,084,175,000
64	Kab. Solok	13,099,500,000
65	Kab. Tanah Datar	10,943,925,000
66	Kota Bukit Tinggi	4,028,250,000
67	Kota Padang Panjang	2,235,525,000
68	Kota Padang	20,836,200,000
69	Kota Payakumbuh	4,701,675,000
70	Kota Sawahlunto	3,062,700,000
71	Kota Solok	10,501,125,000
72	Kota Pariaman	5,590,350,000
73	Kab. Pasaman Barat	8,490,075,000
74	Kab. Dharmasraya	6,525,150,000

NO	DAERAH	JUMLAH
75	Kab. Solok Selatan	2,758,275,000
	Provinsi Sumatera Barat Total	168,011,850,000
76	Provinsi Riau	350,550,000
77	Kab. Bengkalis	13,197,900,000
78	Kab. Indragiri Hilir	10,860,900,000
79	Kab. Indragiri Hulu	6,537,450,000
80	Kab. Kampar	12,958,050,000
81	Kab. Kuantan Singingi	7,816,650,000
82	Kab. Pelalawan	3,588,525,000
83	Kab. Rokan Hilir	5,049,150,000
84	Kab. Rokan Hulu	10,740,975,000
85	Kab. Siak	7,951,950,000
86	Kota Dumai	4,031,325,000
87	Kota Pekanbaru	13,929,750,000
88	Provinsi Kepulauan Riau	70,725,000
89	Kab. Bintan	5,335,125,000
90	Kab. Natuna	4,855,425,000
91	Kab. Karimun	6,522,075,000
92	Kota Batam	6,700,425,000
93	Kota Tanjung Pinang	4,587,900,000
94	Kab. Lingga	4,375,725,000
95	Kab. Kepulauan Anambas	236,775,000
96	Provinsi Jambi	325,950,000
97	Kab. Batanghari	6,771,150,000
98	Kab. Bungo	7,656,750,000
99	Kab. Kerinci	7,453,800,000

NO	DAERAH	JUMLAH
100	Kab. Merangin	10,627,200,000
101	Kab. Muaro Jambi	8,886,750,000
102	Kab. Sarolangun	7,595,250,000
103	Kab. Tanjung Jabung Barat	5,624,175,000
104	Kab. Tanjung Jabung Timur	6,645,075,000
105	Kab. Tebo	6,709,650,000
106	Kota Jambi	11,180,700,000
107	Kota Sungai Penuh	4,584,825,000
108	Provinsi Sumatera Selatan	562,725,000
109	Kab. Lahat	10,538,025,000
110	Kab. Musi Banyuasin	12,373,800,000
111	Kab. Musi Rawas	11,186,850,000
112	Kab. Muara Enim	15,368,850,000
113	Kab. Ogan Komering Ilir	15,393,450,000
114	Kab. Ogan Komering Ulu	9,501,750,000
115	Kota Palembang	28,268,475,000
116	Kota Pagar Alam	4,028,250,000
117	Kota Lubuk Linggau	6,063,900,000
118	Kota Prabumulih	4,704,750,000
119	Kab. Banyuasin	12,669,000,000
120	Kab. Ogan Ilir	10,630,275,000
121	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	12,349,200,000
122	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6,494,400,000
123	Kab. Empat Lawang	4,627,875,000
124	Provinsi Bangka Belitung	169,125,000
125	Kab. Bangka	6,602,025,000

NO	DAERAH	JUMLAH
126	Kab. Belitung	4,455,675,000
127	Kota Pangkal Pinang	4,261,950,000
128	Kab. Bangka Selatan	3,068,850,000
129	Kab. Bangka Tengah	3,840,675,000
130	Kab. Bangka Barat	3,437,850,000
131	Kab. Belitung Timur	3,563,925,000
132	Provinsi Bengkulu	202,950,000
133	Kab. Bengkulu Selatan	6,180,750,000
134	Kab. Bengkulu Utara	5,854,800,000
135	Kab. Rejang Lebong	7,684,425,000
136	Kota Bengkulu	8,299,425,000
137	Kab. Kaur	3,809,925,000
138	Kab. Seluma	5,894,775,000
139	Kab. Mukomuko	3,849,900,000
140	Kab. Lebong	3,852,975,000
141	Kab. Kepahiang	3,726,900,000
142	Kab. Bengkulu Tengah	5,784,075,000
143	Provinsi Lampung	372,075,000
144	Kab. Lampung Barat	8,693,025,000
145	Kab. Lampung Selatan	11,506,650,000
146	Kab. Lampung Tengah	20,753,175,000
147	Kab. Lampung Utara	12,868,875,000
148	Kab. Lampung Timur	14,926,050,000
149	Kab. Tanggamus	23,108,625,000
150	Kab. Tulang Bawang	13,210,200,000
151	Kab. Way Kanan	9,640,125,000

NO	DAERAH	JUMLAH
152	Kota Bandar Lampung	14,590,875,000
153	Kota Metro	4,301,925,000
154	Kab. Pesawaran	10,107,525,000
155	Provinsi DKI Jakarta	80,924,775,000
156	Provinsi Jawa Barat	7,060,200,000
157	Kab. Bandung	33,412,950,000
158	Kab. Bekasi	19,028,100,000
159	Kab. Bogor	29,061,825,000
160	Kab. Ciamis	32,939,400,000
161	Kab. Cianjur	26,976,975,000
162	Kab. Cirebon	28,034,775,000
163	Kab. Garut	33,569,775,000
164	Kab. Indramayu	26,060,625,000
165	Kab. Karawang	22,641,225,000
166	Kab. Kuningan	26,186,700,000
167	Kab. Majalengka	22,219,950,000
168	Kab. Purwakarta	13,197,900,000
169	Kab. Subang	21,377,400,000
170	Kab. Sukabumi	24,080,325,000
171	Kab. Sumedang	22,201,500,000
172	Kab. Tasikmalaya	27,106,125,000
173	Kota Bandung	37,511,925,000
174	Kota Bekasi	12,924,225,000
175	Kota Bogor	11,460,525,000
176	Kota Cirebon	6,522,075,000
177	Kota Depok	12,718,200,000

NO	DAERAH	JUMLAH
178	Kota Sukabumi	5,664,150,000
179	Kota Cimahi	8,616,150,000
180	Kota Tasikmalaya	12,546,000,000
181	Kota Banjar	4,538,700,000
182	Kab. Bandung Barat	18,124,050,000
183	Provinsi Banten	362,850,000
184	Kab. Lebak	17,681,250,000
185	Kab. Pandeglang	18,096,375,000
186	Kab. Serang	16,309,800,000
187	Kab. Tangerang	17,668,950,000
188	Kota Cilegon	7,149,375,000
189	Kota Tangerang	10,617,975,000
190	Kota Serang	6,995,625,000
191	Provinsi Jawa Tengah	3,437,850,000
192	Kab. Banjarnegara	14,326,425,000
193	Kab. Banyumas	25,242,675,000
194	Kab. Batang	10,325,850,000
195	Kab. Blora	14,375,625,000
196	Kab. Boyolali	19,095,750,000
197	Kab. Brebes	20,743,950,000
198	Kab. Cilacap	24,274,050,000
199	Kab. Demak	11,054,625,000
200	Kab. Grobogan	17,512,125,000
201	Kab. Jepara	15,670,200,000
202	Kab. Karanganyar	22,167,675,000
203	Kab. Kebumen	18,062,550,000

NO	DAERAH	JUMLAH
204	Kab. Kendal	12,918,075,000
205	Kab. Klaten	29,301,675,000
206	Kab. Kudus	14,723,100,000
207	Kab. Magelang	20,516,400,000
208	Kab. Pati	18,219,375,000
209	Kab. Pekalongan	11,466,675,000
210	Kab. Pemalang	15,079,800,000
211	Kab. Purbalingga	14,858,400,000
212	Kab. Purworejo	18,031,800,000
213	Kab. Rembang	11,180,700,000
214	Kab. Semarang	15,015,225,000
215	Kab. Sragen	18,696,000,000
216	Kab. Sukoharjo	15,255,075,000
217	Kab. Tegal	20,676,300,000
218	Kab. Temanggung	12,207,750,000
219	Kab. Wonogiri	21,392,775,000
220	Kab. Wonosobo	11,700,375,000
221	Kota Magelang	5,015,325,000
222	Kota Pekalongan	4,120,500,000
223	Kota Salatiga	4,480,275,000
224	Kota Semarang	20,005,950,000
225	Kota Surakarta	12,985,725,000
226	Kota Tegal	4,959,975,000
227	Provinsi DI Yogyakarta	2,785,950,000
228	Kab. Bantul	19,520,100,000
229	Kab. Gunung Kidul	22,370,625,000
230	Kab. Kulon Progo	14,231,100,000

NO	DAERAH	JUMLAH
231	Kab. Sleman	20,393,400,000
232	Kota Yogyakarta	9,821,550,000
233	Provinsi Jawa Timur	4,065,150,000
234	Kab. Bangkalan	14,876,850,000
235	Kab. Banyuwangi	23,637,525,000
236	Kab. Blitar	23,280,825,000
237	Kab. Bojonegoro	15,993,075,000
238	Kab. Bondowoso	11,638,875,000
239	Kab. Gresik	12,164,700,000
240	Kab. Jember	28,757,400,000
241	Kab. Jombang	16,368,225,000
242	Kab. Kediri	22,216,875,000
243	Kab. Lamongan	18,117,900,000
244	Kab. Lumajang	13,806,750,000
245	Kab. Madiun	15,494,925,000
246	Kab. Magetan	17,862,675,000
247	Kab. Malang	27,631,950,000
248	Kab. Mojokerto	17,318,400,000
249	Kab. Nganjuk	23,729,775,000
250	Kab. Ngawi	15,424,200,000
251	Kab. Pacitan	12,841,200,000
252	Kab. Pamekasan	13,849,800,000
253	Kab. Pasuruan	13,511,550,000
254	Kab. Ponorogo	16,438,950,000
255	Kab. Probolinggo	13,643,775,000
256	Kab. Sampang	13,800,600,000
257	Kab. Sidoarjo	22,373,700,000

NO	DAERAH	JUMLAH
258	Kab. Situbondo	11,525,100,000
259	Kab. Sumenep	14,830,725,000
260	Kab. Trenggalek	17,404,500,000
261	Kab. Tuban	13,151,775,000
262	Kab. Tulungagung	26,254,350,000
263	Kota Blitar	4,784,700,000
264	Kota Kediri	6,974,100,000
265	Kota Madiun	8,041,125,000
266	Kota Malang	9,501,750,000
267	Kota Mojokerto	2,782,875,000
268	Kota Pasuruan	3,191,850,000
269	Kota Probolinggo	4,898,475,000
270	Kota Surabaya	16,217,550,000
271	Kota Batu	3,779,175,000
272	Provinsi Kalimantan Barat	242,925,000
273	Kab. Bengkayang	6,383,700,000
274	Kab. Landak	8,889,825,000
275	Kab. Kapuas Hulu	8,056,500,000
276	Kab. Ketapang	8,871,375,000
277	Kab. Pontianak	5,688,750,000
278	Kab. Sambas	13,041,075,000
279	Kab. Sanggau	11,199,150,000
280	Kab. Sintang	10,593,375,000
281	Kota Pontianak	10,113,675,000
282	Kota Singkawang	6,011,625,000
283	Kab. Sekadau	5,267,475,000
284	Kab. Melawi	4,514,100,000

NO	DAERAH	JUMLAH
285	Kab. Kayong Utara	2,456,925,000
286	Kab. Kubu Raya	10,322,775,000
287	Provinsi Kalimantan Tengah	230,625,000
288	Kab. Barito Selatan	5,774,850,000
289	Kab. Barito Utara	5,458,125,000
290	Kab. Kapuas	10,694,850,000
291	Kab. Kotawaringin Barat	5,654,925,000
292	Kab. Kotawaringin Timur	8,231,775,000
293	Kota Palangkaraya	7,429,200,000
294	Kab. Barito Timur	4,920,000,000
295	Kab. Murung Raya	3,926,775,000
296	Kab. Pulang Pisau	6,030,075,000
297	Kab. Gunung Mas	4,972,275,000
298	Kab. Lamandau	3,204,150,000
299	Kab. Sukamara	1,820,400,000
300	Kab. Katingan	5,713,350,000
301	Kab. Seruyan	3,136,500,000
302	Provinsi Kalimantan Selatan	694,950,000
303	Kab. Banjar	9,018,975,000
304	Kab. Barito Kuala	6,869,550,000
305	Kab. Hulu Sungai Selatan	8,779,125,000
306	Kab. Hulu Sungai Tengah	9,181,950,000
307	Kab. Hulu Sungai Utara	8,456,250,000
308	Kab. Kotabaru	5,353,575,000
309	Kab. Tabalong	6,626,625,000
310	Kab. Tanah Laut	7,629,075,000

NO	DAERAH	JUMLAH
311	Kab. Tapin	6,915,675,000
312	Kota Banjarbaru	4,735,500,000
313	Kota Banjarmasin	11,469,750,000
314	Kab. Balangan	5,199,825,000
315	Kab. Tanah Bumbu	5,596,500,000
316	Provinsi Kalimantan Timur	292,125,000
317	Kab. Berau	6,079,275,000
318	Kab. Bulungan	5,224,425,000
319	Kab. Kutai Kartanegara	12,970,350,000
320	Kab. Kutai Barat	6,023,925,000
321	Kab. Kutai Timur	6,681,975,000
322	Kab. Malinau	2,967,375,000
323	Kab. Nunukan	3,769,950,000
324	Kab. Pasir	5,611,875,000
325	Kota Balikpapan	9,015,900,000
326	Kota Bontang	2,026,425,000
327	Kota Samarinda	11,943,300,000
328	Kota Tarakan	3,637,725,000
329	Kab. Penajam Paser Utara	4,142,025,000
330	Kab. Tana Tidung	1,030,125,000
331	Provinsi Sulawesi Utara	252,150,000
332	Kab. Bolaang Mongondow	4,590,975,000
333	Kab. Minahasa	11,574,300,000
334	Kab. Sangihe	8,130,300,000
335	Kota Bitung	5,541,150,000
336	Kota Manado	11,921,775,000

NO	DAERAH	JUMLAH
337	Kab. Kepulauan Talaud	5,365,875,000
338	Kab. Minahasa Selatan	9,277,275,000
339	Kota Tomohon	3,167,250,000
340	Kab. Minahasa Utara	5,249,025,000
341	Kota Kotamobagu	4,557,150,000
342	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,699,850,000
343	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,887,425,000
344	Kab. Minahasa Tenggara	3,671,550,000
345	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,236,150,000
346	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,196,175,000
347	Provinsi Gorontalo	166,050,000
348	Kab. Boalemo	4,892,325,000
349	Kab. Gorontalo	7,487,625,000
350	Kota Gorontalo	6,666,600,000
351	Kab. Pohuwato	3,121,125,000
352	Kab. Bone Bolango	4,572,525,000
353	Kab. Gorontalo Utara	3,557,775,000
354	Provinsi Sulawesi Tengah	439,725,000
355	Kab. Banggai	11,669,625,000
356	Kab. Banggai Kepulauan	5,039,925,000
357	Kab. Buol	5,258,250,000
358	Kab. Toli-Toli	5,817,900,000
359	Kab. Donggala	5,387,400,000
360	Kab. Morowali	9,338,775,000
361	Kab. Poso	8,139,525,000
362	Kota Palu	12,321,525,000

NO	DAERAH	JUMLAH
363	Kab. Parigi Moutong	7,346,175,000
364	Kab. Tojo Una Una	6,134,625,000
365	Kab. Sigi	8,265,600,000
366	Provinsi Sulawesi Selatan	1,230,000,000
367	Kab. Bantaeng	5,046,075,000
368	Kab. Barru	6,543,600,000
369	Kab. Bone	17,232,300,000
370	Kab. Bulukumba	11,924,850,000
371	Kab. Enrekang	6,574,350,000
372	Kab. Gowa	11,721,900,000
373	Kab. Jeneponto	8,471,625,000
374	Kab. Luwu	7,020,225,000
375	Kab. Luwu Utara	7,275,450,000
376	Kab. Maros	7,478,400,000
377	Kab. Pangkajene Kepulauan	8,308,650,000
378	Kab. Pinrang	8,994,375,000
379	Kab. Kepulauan Selayar	4,990,725,000
380	Kab. Sidenreng Rappang	7,659,825,000
381	Kab. Sinjai	7,985,775,000
382	Kab. Soppeng	9,486,375,000
383	Kab. Takalar	8,277,900,000
384	Kab. Tana Toraja	6,485,175,000
385	Kab. Wajo	10,399,650,000
386	Kota Pare-pare	4,766,250,000
387	Kota Makassar	19,784,550,000
388	Kota Palopo	5,424,300,000
389	Kab. Luwu Timur	4,406,475,000

NO	DAERAH	JUMLAH
390	Kab. Toraja Utara	7,180,125,000
391	Provinsi Sulawesi Barat	279,825,000
392	Kab. Majene	6,519,000,000
393	Kab. Mamuju	6,743,475,000
394	Kab. Polewali Mandar	9,206,550,000
395	Kab. Mamasa	4,271,175,000
396	Kab. Mamuju Utara	3,321,000,000
397	Provinsi Sulawesi Tenggara	350,550,000
398	Kab. Buton	9,572,475,000
399	Kab. Konawe	9,713,925,000
400	Kab. Kolaka	8,265,600,000
401	Kab. Muna	12,871,950,000
402	Kota Kendari	10,940,850,000
403	Kota Bau-bau	6,263,775,000
404	Kab. Konawe Selatan	6,755,775,000
405	Kab. Bombana	3,813,000,000
406	Kab. Wakatobi	3,837,600,000
407	Kab. Kolaka Utara	3,397,875,000
408	Kab. Konawe Utara	4,265,025,000
409	Kab. Buton Utara	2,189,400,000
410	Provinsi Bali	725,700,000
411	Kab. Badung	10,482,675,000
412	Kab. Bangli	6,629,700,000
413	Kab. Buleleng	17,555,175,000
414	Kab. Gianyar	11,518,950,000

NO	DAERAH	JUMLAH
415	Kab. Jembrana	6,082,350,000
416	Kab. Karangasem	11,371,350,000
417	Kab. Klungkung	6,463,650,000
418	Kab. Tabanan	11,847,975,000
419	Kota Denpasar	9,830,775,000
420	Provinsi Nusa Tenggara Barat	341,325,000
421	Kab. Bima	15,491,850,000
422	Kab. Dompu	7,675,200,000
423	Kab. Lombok Barat	7,515,300,000
424	Kab. Lombok Tengah	15,147,450,000
425	Kab. Lombok Timur	22,462,875,000
426	Kab. Sumbawa	10,602,600,000
427	Kota Mataram	7,524,525,000
428	Kota Bima	5,556,525,000
429	Kab. Sumbawa Barat	3,490,125,000
430	Kab. Lombok Utara	5,119,875,000
431	Provinsi Nusa Tenggara Timur	264,450,000
432	Kab. Alor	6,451,350,000
433	Kab. Belu	11,841,825,000
434	Kab. Ende	9,111,225,000
435	Kab. Flores Timur	8,231,775,000
436	Kab. Kupang	9,667,800,000
437	Kab. Lembata	4,369,575,000
438	Kab. Manggarai	10,740,975,000
439	Kab. Ngada	4,089,750,000
440	Kab. Sikka	8,794,500,000

NO	DAERAH	JUMLAH
441	Kab. Sumba Barat	1,571,325,000
442	Kab. Sumba Timur	5,768,700,000
443	Kab. Timor Tengah Selatan	10,940,850,000
444	Kab. Timor Tengah Utara	7,238,550,000
445	Kota Kupang	7,958,100,000
446	Kab. Rote Ndao	3,932,925,000
447	Kab. Manggarai Barat	5,553,450,000
448	Kab. Nagekeo	4,661,700,000
449	Kab. Sumba Barat Daya	1,891,125,000
450	Kab. Sumba Tengah	1,269,975,000
451	Kab. Manggarai Timur	5,036,850,000
452	Provinsi Maluku	255,225,000
453	Kab. Maluku Tenggara Barat	6,983,325,000
454	Kab. Maluku Tengah	19,470,900,000
455	Kab. Maluku Tenggara	6,269,925,000
456	Kab. Buru	5,003,025,000
457	Kota Ambon	12,450,675,000
458	Kab. Seram Bagian Barat	7,441,500,000
459	Kab. Seram Bagian Timur	3,954,450,000
460	Kab. Kepulauan Aru	3,302,550,000
461	Kota Tual	1,845,000,000
462	Kab. Buru Selatan	1,924,950,000
463	Kab. Maluku Barat Daya	4,178,925,000
464	Provinsi Maluku Utara	246,000,000
465	Kab. Halmahera Tengah	3,831,450,000
466	Kab. Halmahera Barat	7,610,625,000

NO	DAERAH	JUMLAH
467	Kota Ternate	7,346,175,000
468	Kab. Halmahera Timur	2,902,800,000
469	Kota Tidore Kepulauan	6,577,425,000
470	Kab. Kepulauan Sula	3,892,950,000
471	Kab. Halmahera Selatan	5,904,000,000
472	Kab. Halmahera Utara	7,373,850,000
473	Provinsi Papua	242,925,000
474	Kab. Biak Numfor	6,512,850,000
475	Kab. Jayapura	5,873,250,000
476	Kab. Jayawijaya	3,527,025,000
477	Kab. Merauke	7,121,700,000
478	Kab. Mimika	3,373,275,000
479	Kab. Nabire	4,231,200,000
480	Kab. Paniai	2,220,150,000
481	Kab. Puncak Jaya	513,525,000
482	Kab. Kepulauan Yapen	4,858,500,000
483	Kota Jayapura	5,888,625,000
484	Kab. Sarmi	1,202,325,000
485	Kab. Keerom	2,143,275,000
486	Kab. Yahukimo	1,722,000,000
487	Kab. Pegunungan Bintang	1,429,875,000
488	Kab. Tolikara	1,263,825,000
489	Kab. Boven Digoel	1,134,675,000
490	Kab. Mappi	2,438,475,000
491	Kab. Asmat	1,946,475,000
492	Kab. Waropen	1,675,875,000
493	Kab. Supiori	698,025,000

NO	DAERAH	JUMLAH
494	Kab. Mamberamo Raya	1,476,000,000
495	Kab. Mamberamo Tengah	971,700,000
496	Kab. Yalimo	482,775,000
497	Kab. Lanny Jaya	605,775,000
498	Kab. Nduga	544,275,000
499	Kab. Puncak	682,650,000
500	Kab. Dogiyai	1,426,800,000
501	Provinsi Papua Barat	129,150,000
502	Kab. Sorong	4,375,725,000
503	Kab. Manokwari	6,325,275,000
504	Kab. Fak Fak	4,009,800,000
505	Kota Sorong	4,406,475,000
506	Kab. Sorong Selatan	2,293,950,000
507	Kab. Raja Ampat	1,728,150,000
508	Kab. Teluk Bintuni	1,891,125,000
509	Kab. Teluk Wondama	1,180,800,000
510	Kab. Kaimana	1,878,825,000
TOTAL PROVINSI		108,796,575,000
TOTAL KABUPATEN / KOTA		4,466,661,975,000
TOTAL NASIONAL		4,575,458,550,000

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 223/PMK.07/2009 TENTANG
 ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM
 DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI,
 KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2009

DAFTAR REALISASI PEMBAYARAN RAPEL TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Bulan pembayaran : Januari s.d. Desember 2009

DATA GURU PNSD YG BERHAK MENERIMA	
Golongan	Jumlah (orang)
I	
II	
III	
IV	
Jumlah	

Pagu Dana	Realisasi Pembayaran	Sisa Dana	Potongan PPh Pasal 21 *	Keterangan
(1)	(2)	(3) = (1 - 2)	(4)	(5)
Rp	Rp	Rp	Rp	

Catatan *) :

Nama Daerah, 2010

1. PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final.

Kepala Daerah

2. Sertakan copy SSP yang dilegalisir KPP setempat.

ttd

3. Dalam hal terdapat dana yang tidak tersalur sebagian atau seluruhnya sertakan copy SSBP

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI